



Kelapa Sawit **Dan Multiplier Effect Nya Di Pedesaan**

Nama : Almasdi Syahza
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Telp. : 0812 7533 089

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier.

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Dari seluruh sampel yang diamati, rataan pendapatannya petani kelapa sawit di pedesaan sebesar Rp 3,404,123 per bulan, dan sekitar 7,76 persen bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Hasil penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan diperoleh angka pengganda sebesar 3,23. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 323 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan).

Ada dua kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor perkebunan dan produk turunannya di daerah menyebabkan disparitas spasial antar daerah semakin mengecil. Hal ini lebih disebabkan investasi sector perkebunan lebih banyak menggunakan tenaga manual dibandingkan tenaga modern (peralatan), sehingga akan menambah pendapatan masyarakat didaerah sekitarnya; *Kedua*, kemungkinan pembangunan industri turunan kelapa sawit (PKS) di masing-masing daerah perkebunan juga menciptakan peluang kerja dan usaha bagi masyarakat tempatan, sehingga ini juga akan menambah daya beli masyarakat.





Paradigma Baru:

Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau

Nama : Almasdi Syahza
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Telp. : 0812 7533 089

Pengembangan sektor pertanian di Riau dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, yang pada hakikatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah. Faktor yang mendukung prospek pengembangan agribisnis dan agroindustri di Riau adalah: (1) penduduk yang makin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah; (2) meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi); dan (3) keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri). Agribisnis dan agroindustri juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pengembangan sektor pertanian masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala tersebut antara lain: (a) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; (b) ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah; (c) pengadaan dan penyaluran sarana produksi; (d) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi; (e) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani; dan (f) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Dari sisi pemasaran petani menghadapi beberapa kendala untuk memasarkan produk pertanian, antara lain: (a) kesinambungan produksi; (b) panjangnya saluran pemasaran; (c) kurang memadainya pasar; (d) kurang tersedianya informasi pasar; (e) rendahnya kemampuan tawar-menawar; (f) berfluktuasinya harga; (g) rendahnya kualitas produksi; (h) kurang jelasnya jaringan pemasaran; dan (i) rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi. Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usaha tani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.





Kelapa Sawit Dan Kesejahteraan Petani Di Pedesaan Daerah Riau

Nama : Almasdi Syahza
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Telp. : 0812 7533 089

Pemerintah daerah Riau mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Pembangunan perkebunan kelapa sawit membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat pendatang (transmigrasi), karena program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dikaitkan dengan program transmigrasi. Berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan tingginya mobilitas penduduk di daerah Riau terutama di daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Hasil penelitian menunjukkan indek pertumbuhan kesejahteraan (IPK) petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 49 persen. Pada awal krisis tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar 109 %. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Setelah ekonomi pulih tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pembangunan dan perkembangan komoditas kelapa sawit di daerah Riau semakin dirasakan oleh petani, khususnya di daerah pedesaan. Ini dibuktikan dengan meningkatnya IPK petani kelapa sawit pada tahun 2006 sebesar 68, yang berarti kesejahteraan petani kelapa sawit di pedesaan meningkat sebesar 68% dari sebelumnya. Tentu saja peningkatan kesejahteraan ini bukan saja dirasakan oleh petani kelapa sawit, namun juga berpengaruh terhadap multiplier effect ekonomi di pedesaan.

Hasil penelitian menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).





Kelapa Sawit: Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau

Nama : Almasdi Syahza
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Telp. : 0812 7533 089

Sejak pasca krisis tahun 1998 perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat secara tajam yakni pada tahun 1998 luas perkebunan kelapa sawit 901.276 ha meningkat menjadi 2.056.008 ha pada akhir tahun 2010. Selama periode tahun 2001-2010 tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 7,89% per tahun, sementara komoditas perkebunan lainnya seperti karet dan kelapa luas arealnya justru mengalami penurunan.

Bagi masyarakat di daerah pedesaan, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu animo masyarakat terhadap pembangunan perkebunan masih tinggi. Usahatani kelapa sawit memperlihatkan adanya peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan. Hasil survei tahun 2011 pendapatan petani kelapa sawit di pedesaan berkisar UD\$4.600-UD\$5.500 per tahun.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi. Dampak lain yakni terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat dalam upaya mengetaskan kemiskinan di daerah pedesaan. Dampak aktivitas tersebut terlihat dari indikator, antara lain: 1) usahatani kelapa sawit telah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Perbandingan pendapatan antara 40% terendah dengan masyarakat 20% tertinggi sebesar 1,23; 2) tekanan penduduk tanpa subsektor perkebunan sudah melebihi kapasitas kemampuan lahan (>1) yakni sebesar 11,04 pada tahun 2008; 3) daya dukung lahan (DDL) di Daerah Riau sangat tinggi sekali yakni sebesar 138,77; 4) lahan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian ketersediaannya semakin terbatas; 5) pembangunan perkebunan kelapa sawit telah meningkatkan jumlah uang beredar di pedesaan. Kondisi ini menuntut kebutuhan masyarakat untuk berdirinya kelembagaan yang menangani kebutuhan suatu kelompok masyarakat. Lembaga yang terbentuk adalah bank perkreditan rakyat (BPR), bank unit desa oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) bank cabang pembantu dari bank pemerintah lainnya seperti Bank Riau Kepri, Bank BNI, Bank Mandiri. Jumlah uang beredar juga telah menciptakan daya beli dan membuka peluang kerja dan usaha di daerah sekitar pengembangan perkebunan.

Hasil perhitungan daya dukung wilayah (DDW) diperoleh angka indeks sebesar 4,854. Hasil perhitungan ini membuktikan bahwa angka DDW lebih besar dari 1, yang berarti daya dukung wilayah Riau terhadap penyediaan bahan baku PKS sangat besar. Kedepan pertambahan PKS untuk wilayah pedesaan diperlukan sebanyak 63 unit dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam. Namun pembangunan perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan penyebaran kebun petani, terutama petani swadaya.

Guna mengendalikan pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depan atau pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan (*sustainable*) maka ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu: 1) ekologi yaitu unsur: kebutuhan lingkungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi); 2) ekonomi yang merupakan: ketahanan pangan, kelayakan ekonomi yang bernuansa teknologi, dan 3) sosial berupa pemberdayaan masyarakat, kesamaan sosial, kesehatan dan keselamatan penduduk.





Model Pengembangan Daerah Tertinggal

Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau

Nama : Almasdi Syahza
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Telp. : 0812 7533 089

Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pesisir. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terbelakang. Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi *hinterland* KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat di kurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Kebijakan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik.

Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.

Sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: 1) Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah; 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi); dan 3) Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

